

PEMAHAMAN DAN KESADARAN DOSEN TERHADAP ISU MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN (Refleksi pada Dosen Studi Agama di UIN)

Imam Hanafi¹, H. Nazir², Alimuddin Hasan³, Arbi⁴
Institute for Southeast Asian Islamic Studies (ISAIS) UIN Suska Riau¹, Pascasarjana UIN
Suska Riau², Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau^{3,4}

Email: imam.hanafi@uin-suska.ac.id^{1*}, nazirkarim@uin-suska.ac.id², alimuddin@uin-suska.ac.id³, arbiyasin@uin-suska.ac.id⁴

Abstract

This present, the idea of multikulturalism is one of the most important discourses to be implemented in the world of education in Indonesia. The increasing number of ratios of violence and social indifference, which involve ethnicity, ethnicity, religion and interests of certain groups, hints at the importance of the awareness of multikulturalism. Therefore, it is crucial to know how is the ability of the PTKI (Islamic Higher Educations in Indonesia) responding this issue by looking at their lecturers understanding about multikulturalism. Since the change of IAIN to UIN, it is imperative for this institution to have a multikultural paradigm of Islamic studies, to be very urgent. This research wants to know the extent of multikulturalism skills in the learning process for lecturers in the classroom. At the same time want to see the level of knowledge and awareness of lecturers about multikulturalism. The measurement instrument in this study has three dimensions, namely multikultural awareness, knowledge, and skills. 55 score items; 20 items for the knowledge dimension; and 15 score items for skill dimensions. Thus the total item score is 85. Measurement of multikultural dimensions uses different semantic scales with 5 alternative choices. While the dimensions of knowledge and skills use a Likert scale also with 5 choices. This instrument was developed after publication. Multikultural Skills Concept and Survey (MAKSS) from D'Andrea et al and Scale of Knowledge and Multikultural Awareness Counseling (MCKAS) from Ponterotto. The results showed that the level of understanding of the lecturers was quite good, but at the level of awareness, it was still low.

Abstrak

Saat ini, gagasan tentang multikulturalisme menjadi salah satu wacana yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Semakin banyaknya rasio kekerasan dan ketidakpedulian sosial, yang melibatkan etnis, suku, agama dan kepentingan golongan tertentu, mengisyaratkan akan pentingnya kesadaran multikulturalisme tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kemampuan PTKI dalam menyikapi isu ini, dengan melihat kemampuan para pendidikannya dalam memahami multikulturalisme tersebut. Sejak IAIN berubah menjadi UIN, maka keharusan bagi lembaga ini untuk memiliki paradigma studi Islam yang multikultural, menjadi sangat urgen. Riset ini ingin mengetahui sejauh mana ketrampilan multikulturalisme dalam proses pembelajaran bagi para dosen di kelas. Sekaligus ingin melihat tingkat pengetahuan dan kesadaran para dosen tentang multikulturalisme. Instrumen pengukuran dalam penelitian ini, memiliki tiga dimensi, yaitu kesadaran multikultural, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi kesadaran multikultural memuat 55 item skor; 20 item untuk dimensi pengetahuan; dan 15 item skor untuk dimensi keterampilan. Dengan demikian total item skornya adalah 85. Pengukuran dimensi kesadaran multikultural menggunakan skala beda-semantik dengan 5 alternatif pilihan. Sementara untuk dimensi pengetahuan dan keterampilan menggunakan skala Likert juga dengan 5 pilihan. Instrumen ini dikembangkan setelah memodifikasi sejumlah konsep dan gagasan dari instrumen-instrumen sejenis yang telah ada sebelumnya, khususnya the Multikultural Awareness Knowledge and Skills Survey (MAKSS) dari D'Andrea dkk dan Multikultural Counseling Knowledge and Awareness Scale (MCKAS) dari Ponterotto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para dosen cukup baik, namun pada tingkat kesadaran, masih rendah.

Keywords : Multikulturalisme; islamic studies; UIN

Pendahuluan

Menurut Cak Nur (Nurcholish Madjid), saat ini kita berada pada *global village* (desa buana). Sebuah kondisi dimana dunia menjadi sangat transparan, dunia seolah berada pada satu 'desa', tanpa batas administrasi suatu negara. Kita berada pada situasi dimana semua warga negara dapat melakukan kontak-kontak budaya yang semakin cepat. Sehingga pergesekan kultur serta tradisi bahkan agama menjadi tidak terhindarkan. Semua itu tidak lagi mengenal batas-batas geografis secara konvensional (Abdullah, 2005:4).

Agama sebagai salah satu bagian dari identitas primordial seseorang, dengan demikian akan mengalami tekanan-tekanan oleh arus globalisasi tersebut. Misalnya, agama dituntut untuk merespon hasil-hasil teknologi yang lahir dari 'rahim' globalisasi. Dalam konteks sosiologis, konsekuensi dari tata kehidupan global yang tanpa batas itu, maka seseorang akan bertemu dan berjalinkelindan dengan berbagai ras, suku, budaya, dan agama.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya untuk membangun dan menumbuhkan kembali teologi yang berbasis pada semangat multikulturalisme dalam masyarakat. Yaitu sebuah semangat dan kesadaran akan adanya ragam perbedaan, baik ras, suku, budaya, dan agama. Dengan begitu, maka agama akan menjadi sebuah kesatuan entitas (*entities integrity*) dan kekuatan pendorong (*driving force*) bagi terciptanya sebuah tatanan kewarganegaraan yang sama, sederajat, dan memberikan kedamaian, kesejahteraan, dan keramahan, yang pada akhirnya akan tercipta keharmonisan sosial beragama.

Dalam konteks interaksi keagamaan, globalisasi ini menurut Johan Meuleman (1998), telah melahirkan sikap dan kelompok beragama yang kaku, *rigid* dan intoleran. Gejala ini, bisa jadi juga karena adanya kebebasan berorganisasi dan berpolitik pasca kejatuhan Orde Baru (1966 – 1998).

Beberapa kelompok organisasi yang semula bergerak 'dibawah tanah' (*underground*), pelan-pelan membuka diri dengan mendirikan organisasi-organisasi yang cenderung memiliki militansi keagamaan yang fundamentalis-radikal. Mereka ada karena pengaruh dari trans-nasional, juga karena dorongan "dakwah" *amar ma'ruf nahi mungkar*. Organisasi ini, diantaranya adalah Laskar Jihad (LJ, 2000 - 2004), Front Pembela Islam (FPI, 1998 - sekarang), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI, 2000), Jamaah Ikhwan al-Muslimin Indonesia (JAMI, 1950), dan lain-lain.

Kondisi tersebut, telah merubah arah dan wajah studi Islam di Indonesia, terutama sekali ketika kelompok-kelompok keagamaan tersebut kemudian menjadikan kekerasan sebagai media dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Tidak heran jika kemudian muncul fenomena terorisme di Indonesia, bahkan Indonesia sering disebut sebagai "sarang teroris".

Begitu pula, wajah Islam Indonesia, yang semula sebagai negara yang sangat toleran, moderat, dan menghormati keragaman di mata luar (*outsider*), sekarang telah mengalami pergeseran. Sebagaimana yang diakui oleh Zachary Abuza (dalam Bruinessen, 2013), bahwa :

Islam in Southeast Asia has always been defined by tolerance, moderation, and pluralism. Most of the Muslim inhabitants of Southeast Asia support the secular state and eschew the violence and literal interpretation of Islam that have plagued their South Asia and Middle Eastern co-religionist. Only a small minority advocates the establishment of Islamic regimes governed by sharia, law based on the Qur'an.

Sebagai agama yang berada dalam sebuah negara yang menghimpun berbagai suku bangsa dan agama, maka kajian terhadap Islam di Indonesia, perlu mempertimbangkan ruang lintas kultur, bahasa, agama, kelompok etnik, dan

negara agar saling bertemu, bersinergi dan bersama-sama menjadikan Islam yang *rahmatan lil alamain*.

Dalam konteks ini, Amin Abdullah (2011:3-20) sesungguhnya pernah menyarankan untuk melakukan rekonstruksi studi Islam (*Islamic Studies*) di Indonesia dengan cara “*Mempertautkan Ulum ad-Din, al-Fikr al-Islam, dan Dirasat Islamiyah*”. Menurut Amin, watak dasar dari ‘*Ulumu ad-Din*’ adalah representasi dari tradisi lokal keislaman yang berbasis pada teks-teks atau *nash-nash* agama, terutama Qur’an dan Sunnah. Sementara watak *al-Fikru al-Islam* adalah representasi dari pengumpulan humanitas pemikiran keislaman yang berbasis pada rasio-intelekt atau tradisi ‘*aqli*’; misalnya falsafah, kalam, tafsir, fiqh, dan lainnya. Sedangkan watak dasar *Dirasat Islamiyah* adalah pendekatan studi Islam yang melibatkan keilmuan sosial kritis-komparatif, lantaran melibatkan seluruh pengalaman (*eksperience*); bisa psikologi, sosiologi, antropologi, dan seterusnya. (Abdullah, 2011).

Atas dasar itulah, IAIN melakukan transformasi menjadi UIN di Indonesia. Sebagaimana diketahui, di era multikultural dewasa ini, Kementerian Agama telah memiliki PTKIN (Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) berbentuk UIN, dengan jumlah yang cukup banyak. Hingga akhir 2005 sebanyak 6 PTAIN yang telah berhasil melakukan transformasi dari IAIN dan STAIN menjadi UIN, yakni: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (20 Mei 2002), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (21 Juni 2004), UIN Maliki Malang (21 Juni 2004), UIN Sunan Gunung Djati Bandung (10 Oktober 2005), UIN Syarif Kasim Pekanbaru (2005), dan UIN Alauddin Makassar (2005). Setelah hampir 10 tahun, selama kepemimpinan Menteri Agama Maftuh Basuni, proses perubahan IAIN ke UIN mengalami ‘kemandekan’. Barulah dipenghujung tahun 2014, tiga IAIN diresmikan menjadi UIN, yaitu UIN

Walisongo Semarang, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Aceh, dan UIN Medan Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2017 ini, telah diresmikan 6 IAIN lagi menjadi UIN, yaitu UIN Jambi, UIN Padang, UIN Lampung, UIN Banten, UIN Mataram, dan UIN Banjarmasin.

Paradigma yang diusung oleh UIN adalah melakukan integrasi ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu sosial-sains. Sehingga di awal-awal berdirinya, mereka menawarkan berbagai fakultas dan program studi umum. Mulai dari fakultas dan prodi keislaman hingga fakultas dan prodi non-keislaman.

Konsekuensi dari dibukanya fakultas dan prodi dengan nomenklatur umum tersebut, adalah masuknya beberapa orang dosen dengan kualifikasi pendidikan umum. Belum lagi mereka yang dulunya adalah alumnus dari pendidikan Tinggi Agama Islam secara mengejutkan, beberapa diantara diantaranya mengambil magister di Perguruan tinggi Umum bahkan mengambil program doktoral di Perguruan tinggi Umum. Masuknya dosen dengan latar belakang umum dan pendidikan magister dan doktor di studi umum menunjukkan telah lenyapnya klaim homogenitas serta klaim “ortodoksi studi Islam” yang dikembangkan perguruan tinggi Agama Islam saat ini. Persoalan lainnya adalah masuknya beberapa mahasiswa non-muslim, yang mengambil jurusan-jurusan umum, misalnya psikologi, sains dan teknologi, pertanian dan peternakan, bahasa Inggris, dan lainnya. Kondisi ini, bukan saja memunculkan heterodoksi mata kuliah, juga muncul semangat baru yang berkembang pada ragam wilayah pendisiplinan ilmu.

Lebih lanjut, implikasi yang lebih jauh bagi perkembangan studi Islam di UIN adalah, **Pertama**, di satu sisi terdapat semangat untuk mempertahankan studi ilmu-ilmu Islam dengan pemikiran-pemikiran tradisional yang menjadi sumber asli didirikannya PTKIN, namun di sisi lain terdapat kuasa untuk tetap

mempertahankan lienearitas yang konsisten disiplin ilmu yang dimiliki sebagaimana yang diembannya.

Kedua, terdapat asumsi bahwa PTKIN ini harus menerima multikulturalisme dengan segala konsekuensinya. Basis filosofis dan metodologis yang mencerminkan multikulturalisme harus dicerap agar mendapatkan identitas metodologis yang jelas dalam merespon persoalan tersebut. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan tinggi harus mampu menerima kebenaran dari sumber-sumber yang tidak berorientasi pada agama saja.

Ketiga, semangat eklektisisme yang berusaha membaurkan atau mendinamisir antara pengajaran tradisional dengan modern. Yang ketiga ini memiliki dua kecenderungan utama. *Pertama*, cenderung ke tradisional dengan menampilkan wajah modernitas dalam kerangka ajaran tradisional. Klaim bahwa seluruh yang diujarkan oleh modernitas sudah termaktub dalam ajaran Islam, misalnya, menjadi *mainstream* dari kelompok ini. *Kedua* dari yang ketiga ini memiliki kecenderungan ke modernitas dengan mengacu pada modernitas untuk membaca ajaran dan ujaran tradisional.

Dalam konteks ini agama dan seluruh ajaran agama dirasionalisasikan dalam konteks Weberian. Weber menggariskan dua model rasionalitas. *Pertama*, Rasionalitas Tujuan yang menyebabkan bahwa seseorang atau sekelompok orang dalam suatu tindakan akan berorientasi pada tujuan tindakan tersebut, cara mencapainya serta akibat-akibatnya, dan *Kedua*, Rasionalitas Nilai, yang menyebabkan dalam mencapai suatu tujuan orientasi utama adalah pada nilai-nilai atau norma yang membenarkan penggunaan suatu cara tertentu. Kesadaran akan nilai-nilai etis, estetis dan religius oleh Weber dicirikan bersifat substantif, sebab orang yang bertindak dengan rasionalitas ini mementingkan komitmen rasionalnya terhadap nilai yang dihayatinya. Karenanya nilai dalam

konteks ini bersifat sangat substantif dan dengan demikian menanggalkan dimensi bentuknya. Pendeknya lebih mementingkan isi daripada tampilan luarnya (Farid, 2018:55-56).

Keempat, adanya semangat untuk kembali kepada 'ajaran Islam' di kalangan program studi Umum. Misalnya Fakultas Sains dan Teknologi. Kecendrungan ini semakin menguatkan tantangan multikulturalisme. Karena ada sebuah kajian yang menunjukkan bahwa potensi tumbuhnya kelompok-kelompok radikal biasanya di fakultas-fakultas eksakta (Jurdi, 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan para dosen di UIN dalam memahami multikulturalisme. Pemahaman ini didasarkan pada pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran. Konsep dan indikasi dari tiga aspek multikulturalisme ini, diambil dari konsep yang dikembangkan oleh Husni Thoyyar (2014). Untuk memperoleh data tentang hal tersebut, maka dipilih 50 dosen agama di UIN Riau dan 50 dosen agama di UIN Jakarta. Para dosen dibedakan bidang keahlian, yaitu yang memiliki latarbelakang disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum. Kemudian, UIN dipilih hanya UIN Riau dan UIN Jakarta.

Perkembangan Studi Islam di Indonesia

Pada dasarnya, kajian tentang Islam (*Islamic Study*) merupakan bagian dari kualitas intelektual masyarakat Muslim itu sendiri, dalam merespon setiap persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam maknanya yang lebih luas, studi Islam berarti kerja-kerja intelektualisme masyarakat muslim. Tidak heran jika kemudian, Syafii Maarif, (1997;34) mendesak kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas profesi dibidangnya, dengan terus mendalami bidang-bidang disiplin lain diluar profesinya. Artinya, sebagai seorang muslim, harus mampu mengembangkan visi intelektual dengan melintas batas disiplin yang dimilikinya.

Masyarakat muslim perlu menekuni falsafah, sejarah, agama-agama, sastra, dan perkembangan diskursus intelektual lainnya. Tanpa usaha menggali komponen ilmu-ilmu lain, universalisme dan visi intelektual studi Islam akan terpasung oleh spesialisasi bidang yang digelutinya (Maarif, 1997:34).

Di era multikulturalisme saat ini, dimana ruang dan waktu tidak dibatasi oleh sekat geografis, maka seorang muslim harus mampu melintasi batas-batas disiplin ilmu yang digelutinya. Tanpa ada upaya itu, jangan heran jika kemudian studi Islam akan mengalami kemandulan dan kebangkrutan intelektual di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, sebagaimana yang disinyalir oleh Syafii Maarif di atas.

Namun demikian, menurut Rahman (dalam Maarif, 1993), rekonstruksi kajian Islam yang berupaya menerobos sekat disiplin ilmu tersebut, secara etis harus berada pada dasar *core* keilmuan yang kuat yang dimilikinya, yaitu harus berakar pada *Qur'an oriented*, artinya segala permasalahan yang ada harus dipelajari dan ditimbang dulu berdasarkan sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Di sinilah posisi penggunaan paradigma “teosentrisme” berlaku.

Demikian juga pada saat yang sama diperlukan paradigma antroposentrisme, yaitu penggunaan aspek-aspek kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan studi Islam. Sebab “Islam yang tidak dapat memecahkan problem-problem kemanusiaan hanya akan menjadi ancaman di masa depan”, tegas Rahman (dalam Maarif, 1993).

Dari kebutuhan tersebut, maka pada mulanya studi Islam di Indonesia masih bersifat *particular pattern*, sebagaimana studi Islam pada abad pertengahan, tampaknya masih menjadi bagian dari proses pembelajaran di PTAI. Padahal, sebagaimana dikatakan Harun Nasution (1985:58), pola semacam ini tidak lagi memiliki makna yang signifikan. Hal ini

disebabkan karena studi Islam *particular pattern* tidak mampu memberikan deskripsi secara memadai terhadap fenomena keagamaan secara lebih utuh. Pola studi Islam yang *particular pattern* ini, lebih didominasi oleh corak dogmatis, partikular, dan tidak selaras dengan dinamika dan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, selalu saja terbuka ruang yang tidak mampu dijelajahi oleh studi Islam dengan pola *particular pattern* ini. Implikasinya, studi Islam belum diakui oleh para ahli sejarah agama-agama dalam studi agama. Lebih jauh lagi, studi Islam kemudian dipandang tidak secara objektif. Bahkan Islam kemudian diidentikkan dan dipahami hanya dari segi sakralitas dan ritualitas semata-mata (Abdullah, 2000).

Padahal, ajaran Islam tidak hanya terdiri dari aspek sakralitas saja, tetapi juga terdapat dimensi profanitas. Dalam studi Islam dengan pola *particular pattern*, dimensi profanitas kurang memperoleh perhatian secara memadai, atau bahkan ditinggalkan (Abdullah, 2000).

Salah satu cita-cita dari berdirinya IAIN atau PTAI adalah menjadi *avant garde* dalam mengkaji Islam bukan sebagai doktrin yang profanic (Azra, 1999:70), melainkan sebagai sebuah disiplin ilmu yang profanic juga empirik.

Pada periode awal-awal berdirinya PTAI, yaitu pada kurun waktu 1950 – 1970, studi Islam didominasi oleh pendekatan kajian Islam yang normatif-doktrinal. Yakni, pendekatan yang lebih mengedepankan dimensi legal formal Islam (shari'ah) dan teologi (*ushul ad-din*). Hal yang demikian terjadi menurut Riyanto (2014:1), karena IAIN/PTAI masih dikuasai oleh alumni Timur Tengah. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Azra, (1999:6) bahwa pendekatan normatif-idealistik itu, merupakan kepanjangan-tangan dari sejumlah perguruan tinggi Islam Timur Tengah, utamanya al-Azhar Kairo.

Pada periode 1971 – 1990, studi Islam mulai bergeser pada pemikiran

Islam. Yaitu kajian Islam yang lebih mengarah pada konteksnya, bersifat sosio-kultural yang menyebarkan. Beberapa tokoh dan intelektual Muslim seperti Nurcholish Madjid, Harun Nasution dan Mukti Ali, melakukan reorientasi kajian Islam. Perubahan semakin mengalami peningkatan, ketika para intelektual muda Muslim untuk meneruskan jenjang studinya ke Barat.

Studi Islam pada periode ini, mulai menggeliat dan cenderung lebih terbuka, karena Islam tidak hanya dilihat dari satu pendekatan saja, melainkan dengan mengenalkan berbagai mazhab, faham, dan pemikiran lain. Pendekatan kajian Islam semacam ini, turut memberikan kontribusi terhadap diterapkannya metode pengkajian Islam yang lebih empiris dan akademis, tanpa menegasikan kenyataan Islam sebagai sistem keyakinan dan agama. Sebagai akibatnya, mahasiswa cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap upaya pemahaman agama yang berbeda.

Fakta lain yang terlihat dari periode ini adalah semakin menguatnya pemahaman bahwa agama sesungguhnya diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kedamaian serta keadilan bagi manusia. Jika pada pendekatan normatif, relasi agama-manusia sebagai bentuk pengabdian manusia atas agama, maka pada pendekatan empirik-kontekstual agama menjadi sarana dalam mewujudkan kedamaian dan keselamatan bagi manusia. Sehingga, agama tidak melulu dianggap sebagai piranti menuju kebahagiaan akhirat, melainkan juga keselamatan di dunia (*way of life*).

Terahir adalah gelombang ketiga, yaitu periode 1991 – hingga saat ini. Amin (2006:138-141) menulis sebagai berikut:

Gelombang pertama adalah pembentukan core (inti) Ulum al-Din yang dilakukan oleh para penulis dari dalam (intern; in-sider). Gelombang kedua adalah munculnya gerakan keilmuan orientalis atau dengan menggunakan istilah lain yang lebih simpatik adalah Middle

Eastern Studies. Gelombang kedua tersebut diprakarsai oleh para out-sider. Sedangkan gelombang ketiga adalah gerakan keilmuan studi Islam kontemporer, yang muncul pada paruh kedua abad ke-20. Generasi ini mengenal Ulum al-Din, tetapi juga mengenal ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang biasa dikuasai oleh generasi orientalis yang mengenal social science dan humanities.

Catatan panjang Amin Abdullah tersebut, menggambarkan bahwa pada periode saat ini, studi Islam sudah mulai menerobos batas keilmuannya sendiri. Studi Islam sudah mulai bergerak dari wilayah *local citizenship* (keilmuan Islam), menuju arah *global citizenship* (peradaban global). Di sini, basis epistemologi studi Islam, merajut antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial-humaniora dalam satu ikatan kerja.

Dalam konteks perkembangan lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam, dari IAIN sudah mulai mengarah pada UIN. Sebab pada periode ini, gagasan tentang pentingnya integrasi keilmuan, berkembang dikalangan sarjana studi Islam. Maka muncullah beberapa UIN sebagai realisasi dari reintegrasi keilmuan.

Yang lebih menarik lagi adalah pergeseran studi Islam dalam konteks hubungan antar agama. Pada periode sebelumnya, pendekatan studi Islam masih bersifat apologetik dalam menjustifikasi kebenaran masing-masing agama. Artinya, kebenaran masih berada pada monopoli Islam sendiri, sementara komunitas non-Islam dianggap sebagai orang kafir yang halal darahnya untuk dibunuh. Pada periode ini, paradigma dalam memandang *the others* lebih toleran, inklusif, dan pluralistik.

Melihat perkembangan yang demikian, maka studi Islam membutuhkan bantuan metodologis dalam berbagai pendekatan tentang data keagamaan untuk dapat memahami bahwa semua agama yang memiliki kendaraan historis-empiris

yang khusus (*particular*) dapat memiliki elemen makna keagamaan yang sama, yang dipahami secara transendental-universal.

Data-data keagamaan yang bersifat normatif-teologis ini pada saat yang sama mempunyai muatan historis, sosial, budaya, dan politik. Jadi, dalam bentuknya yang historis-empiris, agama selalu menjadi bagian dari *setting* historis dan sosial dari komunitasnya, namun pada saat yang sama secara fenomenologis ia mempunyai pola umum (*general pattern*) yang dapat dipahami secara intuitif dan intelektual sekaligus oleh umat manusia di manapun mereka berada.

Pergumulan antara keduanya yang tak kunjung selesai kapan pun, yakni antara aspek historis-empiris-partikular dari agama-agama dan aspek meaning (makna) keberagamaan umat manusia yang mendasar dan universal-transendental, pada gilirannya ingin dijabatani dan dikawinkan oleh pendekatan fenomenologi agama (phenomenology of religion)” (Abdullah, 2002).

Dari kutipan di atas terlihat adanya sebuah kemungkinan dan peluang untuk melakukan perluasan dan pemekaran wilayah *research* program dalam rangka untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan ilmu-ilmu keislaman, paling tidak pada kawasan ‘Islam historis’. ‘Islam historis’ yang berada dalam domain “*protective belt*”—meminjam istilah Imre Lakatos dalam M. Amin Abdullah (2002) yang menyatakan bahwa “Islam historis” merupakan fokus yang nyata dan wilayah konkret untuk program rekonstruksi dan reformulasi ilmu-ilmu keislaman pada era modern ini.

Hal itu akan berhasil “*bila dilakukan transplantansi metodologi, teori, dan tradisi riset yang telah dengan sangat teliti dibangun oleh para ilmuwan yang*

bergerak di bidang humaniora, sosial, dan studi agama” (Abdullah, 2006).

Konsepsi tentang Multikulturalisme

Lash dan Featherstone (2002; 2–3) memaknai multikulturalisme sebagai “keberagaman budaya”. Istilah ini berasal dari kata kultur, yang menurut Elizabeth Taylor dan L.H. Morgan (dalam Ainul Yaqin, 2005: 27), berarti sebuah budaya yang universal bagi manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Sementara Emile Durkheim (dalam Ainul Yaqin, 2005: 28) menjelaskan kultur sebagai sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol yang mengikat di dalam masyarakat untuk diterapkan.

Ketika membicarakan sebuah masyarakat yang beragam, maka akan muncul tiga istilah, yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multikultural*). Meskipun ketiga istilah tersebut, tidak mewakili hal yang sama, namun semuanya mengacu pada makna yang sama, yaitu ketidaktunggalan. Jika pluralitas bermakna ‘hal-hal yang lebih dari satu’ (*many*); maka keragaman berarti keberadaan yang ‘lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Sedangkan multikulturalisme secara substansial adalah penerimaan atau pengakuan terhadap kelompok lain yang berbeda, sebagai sebuah satu kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

Dengan demikian, hakikat dari multikulturalisme sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk mengakui (*politics of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin hak eksistensinya. Dalam konsep kebangsaan, multikulturalisme berimplikasi pada sebuah pengakuan atas adanya keberagaman, perbedaan, dan

kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis dan agama.

Multikulturalisme juga merupakan sebuah *landscape* yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam, namun masing-masing kelompok yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan untuk saling menghormati dan menghargai.

Adapun multikulturalisme yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah tingkatan di mana seseorang secara aktif terlibat dalam proses kesadaran diri, pemerolehan pengetahuan dan implementasi keterampilan dalam bekerja dengan individu-individu yang berbeda. Sementara instrumennya dikembangkan oleh Husni Thoyyar (2014).

Metode Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini adalah 50 dosen agama dan 50 dosen non agama di UIN Suska Riau dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sementara instrumen disusun berdasarkan rumusan *the Multikultural Awareness Knowledge and Skills Survey* (MAKSS) dari D'Andrea dkk (1999: 143-150.) dan *Multikultural Counseling Knowledge and Awareness Scale* (MCKAS) dari Ponterotto (2000). Penyebaran instrumen dilakukan dengan mendatangi langsung partisipan.

Instrumen pengukuran kompetensi multikultural ini terdiri atas 85 item pertanyaan, yang dirancang sebagai instrumen penilaian-diri (*self-assessment*) yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Sebagai penduduk yang mayoritas di bumi Indonesia, umat Islam memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk merawat dan menjaga keanekaragaman bangsa ini. Oleh karena itu, para sarjana muslim Indonesia, tentunya harus memiliki

kompetensi yang baik dalam membingkai aneka-ragam perbedaan yang ada di negeri ini.

Para sarjana muslim Indonesia harus menyadari bahwa penghuni negeri ini sangatlah majemuk, dan merupakan realitas yang tak terbantahkan. Sehingga mereka dapat mengajarkan kepada yang lain tentang adanya lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda-beda dipakai oleh penduduknya serta hampir semua agama besar dunia diwakili, selain dari agama-agama asli yang jumlahnya banyak sekali.

Bercermin dari kenyataan yang sudah ada, dengan keanekaragaman yang dimiliki diatas, maka pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran multikultural menjadi sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam menyikapi realitas tersebut. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme juga mendasarkan diri pada pengakuan terhadap minoritas. Multikulturalisme berdiri dalam ketegangan antara hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan interpretasi atas hak-hak bangsa atas perkembangan dirinya (Kimlicka, 2003).

Berikut adalah gambaran kemampuan atau kompetensi multikulturalisme yang dimiliki dosen Studi Agama di UIN Riau dan UIN Jakarta. Statistik deskriptif yang meliputi rata-rata (mean), standar deviasi (*standard deviation*), dan selisih skor minimum-maksimum (*range*) kompetensi multikultural untuk masing-masing kelompok ditampilkan pada Tabel 1. Besarnya rata-rata skor untuk seluruh kelompok dosen, menunjukkan tingginya kompetensi multikultural mereka. Aspek pengetahuan ini meliputi pengetahuan tentang jaminan akan hak yang sama bagi semua etnik, suku, dan agama, baik dalam jabatan publik maupun mendirikan ibadah; dan menghormati dan menghargai orang

lain yang berbeda suku/etnis atau agama.
 Hasilnya adalah sebagai berikut;

Kategori	N	M	SD	Range
Dosen Agama UIN Jakarta	44	62.64	10.040	40 – 80
Dosen Agama UIN Riau	46	49.50	5.947	35 – 63

Tabel 1. Statistik Deskriptif Rata-Rata (Mean), Standar Deviasi (Standard Deviation), dan Selisih Skor Minimum-Maksimum (Range) Pengetahuan Multikultural
*Sumber:*Data diolah, 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pengetahuan multikultural yang dimiliki oleh dosen UIN Jakarta jauh lebih tinggi di bandingkan dengan para dosen di UIN Riau. Namun, jika dilihat dari nilai yang dimiliki oleh para dosen agama UIN Jakarta juga masih berada pada rata-rata sedang, pengetahuannya tentang multikulturalisme. Namun untuk para dosen agama di UIN Riau, kompetensi multikulturalismenya jauh lebih rendah.

Jakarta yang lebih heterogen dan lebih banyak di huni oleh masyarakat urban, menjadi diantara faktor yang mempengaruhi pengetahuan para dosen studi agama di UIN Jakarta. Pengetahuan seseorang tentang multikulturalisme akan segera muncul, jika dibarengi oleh

pengetahuannya tentang ragam budaya dan suku yang ada di sekitarnya (Choirul Mahfud, 2008: 103). Beberapa ahli juga memberikan catatan bahwa, penggunaan media sosial dapat mempengaruhi pengetahuan multikulturalisme individu, meskipun efeknya tidak sama antara satu dengan yang lainnya (Li dan Tsai, 2015).

Selain pengetahuan, keterampilan multikulturalisme menjadi sangat penting untuk berpartisipasi dalam kerangka berdemokrasi dan kebebasan masyarakat. Juga keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain. Dalam konteks guru atau dosen, ketrampilan ini mewujudkan pada proses pembelajaran di kelas.

Kategori	N	M	SD	Range
Dosen Agama UIN Jakarta	44	54.09	10.161	35 – 70
Dosen Agama UIN Riau	46	47.52	9.910	23 – 71

Tabel 2 : Statistik Deskriptif Rata-Rata (Mean), Standar Deviasi (Standard Deviation), dan Selisih Skor Minimum-Maksimum (Range) Ketrampilan Multikultural

Sumber: Data diolah, 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah ketrampilan multikultural yang dimiliki oleh dosen UIN Jakarta juga masih lebih tinggi di banding para dosen di UIN Riau. Namun demikian, jika dilihat

hasil nilai tersebut, nilai ketrampilan yang dimiliki oleh para dosen agama di UIN Jakarta, masih relatif rendah.

Padahal, ketrampilan ini sangat strategis perannya dalam melakukan

transformasi pengetahuan kepada mahasiswa. *Pertama*, memberikan terobosan baru dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan penghayatan, empati, dan mengurangi prasangka buruk (*su'su dzan*) mahasiswa terhadap orang lain (*the others*) yang berbeda, sehingga melahirkan warga negara yang berkesadaran multi-budaya, multi-etnik, dan multi-agama, sekaligus mampu menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan (*nonviolent*); *Kedua*, pendidik atau dosen akan berusaha menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang mengedepankan proses interaksi sosial dan

kebebasan memilih pandangan atau argumentasi yang berbeda-beda, sehingga memiliki nilai afeksi yang kuat; *Ketiga*, melakukan pengayaan tentang nilai multikulturalisme melalui kerja-kerja kolaboratif dan membangun komitmen bersama tentang nilai kehidupan masyarakat yang serba majemuk; dan *Keempat*, memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa SARA yang timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka (Primawati, 2013).

Kategori	N	M	SD	Range
Dosen Agama UIN Jakarta	44	209.84	36.843	140 – 270
Dosen Agama UIN Riau	46	197.46	33.792	139 – 258

Sumber: *Data diolah*, 2018

Tabel 3. Statistik Deskriptif Rata-Rata (Mean), Standar Deviasi (Standard Deviation), dan Selisih Skor Minimum-Maksimum (Range) Kesadaran Multikultural

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kesadaran multikultural yang dimiliki oleh dosen UIN Jakarta juga lebih tinggi di banding UIN Riau. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran tentang multikulturalisme di kalangan dosen sudah menunjukkan tingkat yang baik. Jika merujuk pada perolehan rata-rata nilai, sudah hampir mendekati nilai maksimal, yaitu 275. Hal ini tentu cukup menggembirakan bagi perkembangan studi Islam di Indonesia.

Namun demikian, masih terdapat skor yang cukup memprihatinkan di tunjukkan oleh responden dosen dari UIN Riau yang jauh dibawah skor rata-rata, yaitu 88. Meskipun prosentasenya hanya 2.1%, akan tetapi jika diakumulatifkan skor mereka yang dibawah rata-rata, yaitu 135 kebawah, jumlahnya cukup memprihatinkan, yaitu 34.04%. Hal ini, tentu menjadi catatan penting bagi

pengambil kebijakan untuk mengembangkan lebih luas orientasi studi Islam yang lebih baik lagi. Rendahnya kesadaran multikulturalisme di UIN Jakarta dipengaruhi oleh isu pilkada Jakarta yang melibatkan sentiment etnis dan agama.

Kesadaran ini, menjadi sangat penting karena akan mengurangi sikap-sikap sentimen atas adanya perbedaan. Sehingga bangsa yang saat ini belum benar-benar steril dari ancaman konflik etnis dan agama, radikalisme agama, separatisme, dan disintegrasi bangsa, dapat diredam dan diminimalisir. Karena inti dari kesadaran multikulturalisme adalah upaya internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat dan lain-lainnya.

Oleh sebab itu, kajian studi Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menjadi sangat penting untuk berusaha melibatkan aspek kemanusiaan dalam setiap kajiannya. Hal ini penting

untuk dilakukan karena dengan memandang nilai kemanusiaan, maka akan lahir nilai-nilai objektif yang tidak dibatasi oleh kultur tertentu dan agama tertentu.

Begitu juga persamaan hak azasi manusia, yang merupakan nilai-nilai dasar kemanusiaan, dan yang di bangun di atas fondasi demokrasi (Thoha, 1996), menjadi sangat penting untuk ditransformasikan dalam studi Islam di Perguruan Tinggi. Sebab, antara pendidikan demokratis dan pendidikan pluralis-multikultural adalah sebuah mata rantai yang saling jalin-berkelindan. Masing-masing saling bergantung dan saling mempengaruhi (Naim dan Syauqi, 2008). Dengan begitu, maka usaha untuk membangun paradigma pendidikan yang pluralis-multikultural, menjadi sebuah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Secara normatif, sebenarnya sudah diatur oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Menurut aturan itu, kurikulum harus disusun dan dikembangkan salah satunya dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.

Dalam pelaksanaannya, kurikulum tersebut diimplementasikan dengan mendasarkan pada lima pilar sebagai berikut; yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan formal menjadi sangatlah penting dalam membangun

proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleran terhadap semua yang berbeda diluar dirinya. Rendahnya kesadaran multikulturalisme berdasarkan riset ini, menjadikan pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, harus lebih serius dalam melakukan transformasi nilai tersebut. Sehingga proses pendidikan menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran pluralis dan toleran diperlukan dalam rekonstruksi studi Islam di Indonesia (Naim dan Syauqi, 2008).

Jika tidak, maka tidak heran jika kemudian nilai-nilai kesatuan dan keutuhan bangsa ini, mulai tergerus oleh sikap-sikap yang menonjolkan identitas individual dan kelompok. Gejala ini, sudah mulai terasa, dimana masing-masing kelompok maupun individu mulai menunjukkan identitasnya, baik melalui politik, agama, maupun lainnya. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas (Aly, 2003:73).

Bagaimanapun keragaman memiliki potensi yang sangat besar bagi munculnya berbagai persoalan, seperti kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, korupsi, kolusi, nepotisme, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan. Dan hari ini, jika merujuk pada rendahnya kesadaran multikulturalisme di kalangan dosen, yang *nota bene* memiliki peluang besar bagi transformasi nilai-nilai multikulturalisme, maka wajah multikultur di Indonesia menjadi cukup memprihatinkan. Ia ibarat api dalam sekam, yang suatu saat bisa mengakibatkan terjadinya berbagai konflik akibat suhu yang memanas.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Tingkat kesadaran multikulturalisme di kalangan dosen UIN Riau dan Jakarta cukup baik, sudah mendekati skor ideal yaitu 275. *Kedua*, Terdapat perbedaan tingkat pemahaman multikulturalisme antara dosen UIN Riau

dengan dosen UIN Jakarta, *Ketiga*, Tidak ada korelasi antara tingkat pengetahuan dan ketrampilan multikultural yang dimiliki oleh dosen dengan kesadaran multikultural yang mereka miliki. *Wallahu a'lam bi showab*.

Referensi

- Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford : Oxford University Press, 1995), h. 1355.
- Ali, Muhammad. 2010. *Dosen Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Abdullah, Amin 2005., *Pendidikan Agama Era Multikultural Multi Religius*, Jakarta: PSAP
- Primawati., Laurencia, 2013., "Pembelajaran Multikultural Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai Kebangsaan" dalam JUPIIS VOLUME 5 Nomor 2, Desember 2013
- Meuleman., Johan, 1998, "Sikap Islam Terhadap Perkembangan Kontemporer", dalam Mukti Ali,dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Hasan., Norhaidi, 2005, "Transnational Islam in Indonesia", dalam Peter Mandaville et al., *Transnational Islam in South and Southeast Asia: Movements, Networks, and Conflict Dynamics*, Washington: The National Bureau of Asian Research
- Bruinessen., Martin van, 2013, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*, Singapore: ISEAS
- Abdullah., M. Amin, 2011, "Mempertautkan *Ulum ad-Din, al-Fikr al-Islam*, dan *Dirosat Islamiyah*; Sumbangan Keilmuan Islam untuk Peradaban Global" dalam *Proceeding Acis ke-XI*,
- Suharto., Toto, 2008, "Tren Baru Studi Islam di Indonesia: Menuju Teo-antroposentrisme" dalam Toto Suharto dan Nor Huda (eds.), *Arah Baru Studi Islam di Indonesia: Teori dan Metodologi*, Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Jurdi., Syarifuddin, dalam seminar "Radikalisme Kawan Kita". <http://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/398/page/fakultas>
- Susanto, "Bahan Belajar Mandiri Sebagai Suatu Model Modul Studi Islam Berwawasan Deradikalisasi Pemahaman Agama" dalam *Jurnal PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan* - Vol. 30 No. 2 Oktober 2016.
- Ghafur, A., 2014. *Jejak radikalisme pemahaman agama di perguruan tinggi*. Ciputat: Cendekia Press.
- Maarif., A. Syafii, 1997, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*. Cet. I; Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Syafi., A. Syafii, 1993, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*; (Bandung: Mizan 1993), hlm. 135
- Nasution., Harun, 1985, *Islam Rasional, Gerakan dan Pemikiran*, Jakarta: LSAF,
- Abdullah., M. Amin, 2000., *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Aditya Media, 2000
- Abdullah., M. Amin, 1996., *Study Agama, Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdullah., M. Amin, "Pengantar", dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. iii-iv
- Abdullah., M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 55-56.
- Azra., Azyumardi, 2000, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 2000

- Abdullah., Taufik, 1997, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Martin., Richard C., 2002, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Muhadjir., Noeng, 2000., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Lash., Scott Lash dan Featherstone., Mike (ed.), 2002., *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*, London: Sage Publication,
- Taylor., Charles. 1994., "The Politics of Recognition" dalam Amy Gutman. *Multikulturalism, Examining the Politics of Recognition*, Princeton: Princeton University Press
- Tilaar., H.A.R., 2002, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo
- Jay., Gregory. 2005., "Critical Contexts For Multikulturalism" dalam [http://www.uwm.edu/~gjay/Multicult /conte xtsmulticult.htm](http://www.uwm.edu/~gjay/Multicult/conte xtsmulticult.htm), download 2 Desember 2005
- Kymlica., Willy. 1995., *Multikultural , Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press
- Fuller., Steve, 2002., "Social Epistemology as a Critical Philosophy of Multikulturalism" dalam Ram Mahalingan dan Cameron McCarthy, *Multikulturalism Curriculum*
- Parekh., Bikhu. 1999., "What is Multikulturalism?" dalam *Jurnal India Seminar*, Desember 1999.
- Thoyyar., Husni, 2014., "Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kompetensi Multikultural" dalam *Makalah AICIS tahun 2014 di Balikpapan*.
- The Wahid Institute, *Prolog Ilusi Negara Islam*, KH. Abdurrahman Wahid (Ed), (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 7
- Thoha., Chabib, 1996., *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Naim., Ngainun dan Syauqi., Achmad, 2008., *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Jogjakarta: Ar-ruz Media
- Li,C. and Tsai, W.-H.S. (2015). Social media usage and acculturation: a test with Hispanics in the US. *Computers in Human Behavior*, Vol. 45, pp. 204-212.
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006
- Wawancara dengan 5 orang dosen UIN Jakarta pada tanggal 27 – 28 Oktober 2017.
- Azra, Azyumardi, 1999., "Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri," dalam *Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos
- Tebba, Sudirman, 1993., "Orientasi Mahasiswa dan Kajian Islam IAIN," dalam *Islam Orde Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Riyanto, Waryani Fajar., *Studi Islam Indonesia, 1950-2014: Rekonstruksi sejarah perkembangan studi Islam integratif di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) & Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press
- Farid., Muhammad, 2018, *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Prenada
- D'Andrea M., Daniels, J., Heck, R. (1991). Evaluating the Impact of Multikultural Counseling Training. *Journal of Counseling & Development*, 70, 143-150.